



eureka  
media akara



TERWUJUDNYA INDONESIA MENUJU  
NEGARA MARITIM DUNIA  
**YANG TANGGUH**

A. Junaedi Karso

# TERWUJUDNYA INDONESIA MENUJU NEGARA MARITIM DUNIA YANG TANGGUH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencanangkan lima pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu: 1). Pilar pertama : pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; 2). Pilar kedua : Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; 3). Pilar ketiga : Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritime; 4). Pilar keempat : Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan; dan 5). Pilar kelima : Membangun kekuatan pertahanan maritim.

Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Dimana sektor Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan KKP tersebut diterjemahkan ke dalam misi tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, yaitu:

1. **KEDAULATAN.** Mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
2. **KEBERLANJUTAN.** Mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
3. **KESEJAHTERAAN** Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.



0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# TERWUJUDNYA INDONESIA MENUJU NEGARA MARITIM DUNIA YANG TANGGUH

A. Junaedi Karso



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**TERWUJUDNYA INDONESIA MENUJU NEGARA MARITIM  
DUNIA YANG TANGGUH**

**Penulis** : A. Junaedi Karso

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Tukaryanto, S.Pd., Gr.

**ISBN** : 978-623-5896-44-1

**NO HKI** : EC00202201776

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*  
*Bismillahirrohmanirohim*

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “TERWUJUDNYA INDONESIA MENUJU NEGARA MARITIM DUNIA YANG TANGGUH”.

Kami selaku penulis memohon beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan, referensi, kutipan atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh”. Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutif dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website, media serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

*Billahit taufiq walhidayah,*  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Indonesia Negara Kepulauan .....	1
B. Pelabuhan Indonesia .....	6
C. Wawasan Nusantara.....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Indonesia Negara Maritim.....	16
B. Konsepsi Poros Maritim .....	23
C. Gagasan Poros Maritim.....	25
D. Peluang Usaha Kelautan .....	38
E. Kebijakan Maritim Indonesia.....	41
F. Transportasi Maritim Di Indonesia .....	42
G. Masalah Transportasi Maritim Di Indonesia.....	43
H. Masalah Investasi Transportasi Maritim .....	46
I. Potensi Pembangunan Negara Maritim.....	50
<b>BAB 3 INDONESIA NEGARA MARITIM YANG</b>	
<b>TANGGUH.....</b>	<b>52</b>
A. Negara Maritim.....	52
B. Gagasan Maritim.....	55
C. Perkembangan Sumber Daya Manusia Maritim.....	63
<b>BAB 4 KONSEP TATA RUANG WILAYAH LAUT</b>	
<b>INDONESIA.....</b>	<b>73</b>
A. Sejarah Maritim Indonesia .....	73
B. Ekonomi Maritim.....	85
C. Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim.....	93
D. Perubahan Paradigma Manusia terhadap Laut .....	102
E. Tata Ruang Wilayah Laut Indonesia.....	108
F. Wawasan Nusantara.....	109
G. Desentralisasi Ekonomi Daerah di Sektor Lautan .....	112
H. Mewujudkan Indonesia Menuju Negara Maritim	
Dunia.....	120
<b>BAB 5 RUANG LINGKUP NEGARA MARITIM.....</b>	<b>160</b>
A. Aktifitas Negara Maritim .....	160
B. Tahapan Kegiatan.....	168

C. Peranan Industri Maritim dalam Perekonomian	
Indonesia .....	172
D. Perkembangan PDB Maritim Indonesia.....	174
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>203</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>210</b>



---

**TERWUJUDNYA INDONESIA MENUJU  
NEGARA MARITIM DUNIA YANG  
TANGGUH**

**A. Junaedi Karso**

---





# BAB 1 | PENDAHULUAN

## A. Indonesia Negara Kepulauan

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan potensi ekonomi maritim sebesar Rp. 2026 Triliun, yang terdiri dari pesisir sebesar Rp 650 triliun, bioteknologi Rp 480 triliun, perikanan Rp 380 triliun, minyak bumi Rp 252 triliun, transportasi laut Rp 240 triliun, dan wisata bahari sebesar Rp 24 triliun.

Adapun dasar Indonesia sebagai negara kepulauan tersirat dalam pasal 25A Undang-Undang dasar 1945 pasal dinyatakan, bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan

# BAB 2 | TINJAUAN PUSTAKA

## A. Indonesia Negara Maritim

Kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan demikian usaha atau perjalanan bangsa Indonesia menemukan identitasnya kembali telah terlaksana. Hakekat kesatuan darat (tanah) dan laut (air) ini sebenarnya telah lama ada dalam kesadaran bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam kata "tanah air", suatu istilah atau ungkapan yang tidak terdapat dalam bahasa lain.

Dilihat dari sudut ketatanegaraan ketetapan MPRS tersebut menguatkan apa yang sejak lahir tahun 1957 menjadi kebijaksanaan negara Republik Indonesia di bidang kewilayahan negara, khususnya wilayah perairannya, dan telah diundangkan sejak tahun 1960 (Undang - Undang No. 4 Prp., tahun 1960).

Jauh sebelum masa kemerdekaan, Indonesia ternyata sudah dikenal dunia sebagai Bangsa yang memiliki Peradaban maritim maju. Bahkan, bangsa ini pernah mengalami masa keemasan pada awal abad ke-9 Masehi. Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal bercadik. Dengan alat navigasi seadanya, mereka telah mamapu berlayar ke utara, lalu ke barat memotong lautan Hindia hingga Madagaskar dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan memiliki

# BAB

# 3

## INDONESIA NEGARA MARITIM YANG TANGGUH

### A. Negara Maritim

Misi Negara Maritim ini diperkuat dengan konsepsi “jalan perubahan” JKW-JK yang salah satunya adalah menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan dengan restorasi ekonomi maritim Indonesia sebagai poin ketiga. Kemudian berturut-turut dalam ‘Nawa Cipta’ 9 Agenda Prioritas JKW-JK, disebutkan poin-poin penting terkait dunia kemaritiman Indonesia, diantaranya identitas dan kedaulatan maritim, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, dan mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi tani/nelayan.

Seiring dengan hal tersebut, Presiden terpilih Joko Widodo, yang baru saja dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia, memfokuskan pada pentingnya peran Maritim Indonesia dengan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini merupakan kebijakan strategis, mengingat memang Indonesia merupakan negara bahari yang dikelilingi oleh lautan. Seluruh alur pelayaran dunia akan melalui lautan Indonesia sebagai jalur strategis sehingga harusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai pendekatan diplomasi dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terdapat ide untuk membentuk sebuah

# BAB 4

## KONSEP TATA RUANG WILAYAH LAUT INDONESIA

### A. Sejarah Maritim Indonesia

Penulisan sejarah maritim yang tidak sekadar menampilkan cerita masa lampau dapat memberikan pengertian bagi masyarakat. Peristiwa selalu meninggalkan pesan, dan pesan tersebut memiliki arti yang dapat dijadikan rujukan dalam pembangunan pada masa kini. Segala program pembangunan maritim Indonesia yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan memperkuat posisi negara dalam perekonomian dan politik regional seharusnya dapat merujuk pada masa lampau kemaritiman yang dapat dijadikan bahan analisa dalam proses pembangunan. Tentunya hal itu dapat dilakukan jika historiografi maritim mengedepankan permasalahan kekinian dan para pemangku kebijakan dapat menempatkan sejarah sebagai bahan rujukan dan alisis.

Masa depan sejarah maritim memiliki peluang yang luas sebagai katalis pembangunan kemaritiman Indonesia. Program pemerintah yang berusaha mengembalikan kejayaan maritim Indonesia menjadi poros maritim menjadi ruang bagi sejarah maritim untuk menunjukkan perannya. Konsepsi poros maritim dunia sebagai strategi maritim indonesia sejatinya merupakan kesinambungan dari gagasan masa laludan sekaligus sebagai upaya strategis untuk memaksimalkan seluruhpotensi Indonesia (<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia- poros-maritim-dunia>, 8 Oktober

# BAB | RUANG LINGKUP 5 | NEGARA MARITIM

## A. Aktifitas Negara Maritim

Ruang lingkup kegiatan ini mencakup aktivitas maritim sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau. Selain itu, aktivitas maritim Indonesia juga merujuk pada studi literatur Dutch Maritime Cluster yang mengklasifikasikan aktivitas maritim ke dalam 11 cluster. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, aktivitas Maritim di Indonesia, terdiri dari 9 cluster, yaitu: 1). Perikanan; 2).Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); 3). Industri Bioteknologi; 4). Industri Maritim; 5). Jasa Maritim; 6). Wisata Bahari; 7). Perhubungan Laut; 9). Bangunan Laut; dan 10). Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut.

### 1. Perikanan

Cluster Perikanan mencakup perikanan laut dan payau baik perikanan tangkap maupun budidaya, dan tidak mencakup perikanan air tawar. Cluster ini juga mencakup perdagangan hasil penangkapan dan budidaya ikan laut. Perikanan laut terdiri dari perikanan pantai dan perikanan laut dalam.

Perikanan pantai merupakan bentuk usaha

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Arsyad, R., 2012, *Kelautan atau Maritim?*, shnews.co, Rabu, 13 Juni 2012
- Atmadja, M., 1996, *Eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan*, disampaikan pada peringatan Sarasehan Syukuran Makassar Serui (SSMS96) di Ujung Pandang, 30 Juli 1996, dalam rangka mengenang 50 tahun pembuangan ketujuh tokoh pergerakan kebangsaan Makassar ke Serui, Yapen, Irian Jaya
- Boomgaard, Peter (ed.). (2007). *A World of Water*. Leiden: KITLV Press.
- Brown, C.S.G. (1994). *Bajau*. Yayasan Sejati: Jakarta.
- Budiawan. (2017). *Nasion & Nasionalisme: Jelajah Ringkas Teoritis*. Yogyakarta:
- Dahuri, R., 2013, *Momentum Mengembalikan Kejayaan Negara Maritim*, Koran Sindo, Jum'at, 13 Desember 2013
- Dewan Kelautan Indonesia, 2011, *Satukan NKRI Dengan Mewujudkan Negara Maritim Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Hardin, Garret. (1968). "Tragedy of the commons" *Science* (162):1243-1248.
- Hartono, Dimiyati, *Hukum Laut Internasional: Berbagai Aspek Pengamanan-Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara Republik Indonesia, Ditinjau dalam Hubungan Perkembangan Hukum Laut Internasional*. (1977). Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Hatta, Gusti Muhammad. (2012). "Kata Sambutan" dalam Asep Karsidi, Sobar Sutisna dan Aris Poniman (Ed.), *NKRI: Dari Masa Ke Masa*. Bogor: Sains Press.
- Kartodirdjo, Sartono. (2014). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012, *Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru*, Jakarta.

Neary, Adelle, "Jokowi Spells Out Vision for Indonesia's "Global Maritime Nexus", Southeast Asia from Scott Circle, 26 November 2014, dalam [http://csis.org/files/publication/141126\\_SoutheastAsia\\_Vol\\_5\\_Issue\\_24.pdf](http://csis.org/files/publication/141126_SoutheastAsia_Vol_5_Issue_24.pdf), diunduh pada 21 Maret 2015.

"Presenting Maritime Doctrine", 14 November 2014, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/14/presenting-maritime-doctrine.html>, diunduh pada 21 Maret 2015.

<https://www.amnus-bjm.ac.id/article/9/index.html> di upload pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 19.32 WIB

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/144599-mewujudkan-indonesia-sebagai-negara-maritim-yang-maju.html>



## TENTANG PENULIS



**A Junaedi Karso** lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasional tahun 2020 adalah *Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera*, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan *Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV*, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain *Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang*, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); *Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar*, (Jurnal MODERAT, 2019); *Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar*, (Journal of Government and Civil Society, 2019); *Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng*, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan *Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI*, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain *Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty*, (*International Jurnal of Social Science Humanities Research*, 2019); dan *Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District*,

*Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);*

*Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Piercing Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanities Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implementing Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engineering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech Journsl of Art and Socisl Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Prespective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises, (Artech Journal of Current Business and Financial Affair (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service throught Digital Technology-based Losencing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020). Pencegahan penyalahgunaan dana badan usaha milik desa (bumdes) menuju good governance of bumdes yang berdasarkan prinsip government judgement rule <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa>, 2021)*

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prouement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, *Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* di LPKN tahun 2020, *Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif* di LPKN tahun 2020, *Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015)* di LPKN tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa* di LPKN tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM* di BNSP tahun 2020, *Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM* di BNSP tahun 2020, *Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan* di LPKN tahun 2020, *Diklat*

Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awariness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “*How to Perform While Transform*” di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP

Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer (TOT)* di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer (TOT)* Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer (TOT)* BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research (CIQnR)* di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research (CIQaR)* di Quantum HRM International\_KAN tahun 2021,

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email [Bintang.lyatiara66@gmail.com](mailto:Bintang.lyatiara66@gmail.com), juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202201776, 7 Januari 2022

**Pencipta**

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si.**  
Alamat : Dusun Kebon Randu, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat., Indramayu, JAWA BARAT, 45256  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Dr. A. Junaedi Karso, S.H., MH., M.Si.**  
Alamat : Dusun Kebon Randu, RT. 005/ RW. 001, Desa Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indramayu, JAWA BARAT, 45256  
Kewarganegaraan : Indonesia

**Jenis Ciptaan**

Judul Ciptaan : **Buku**  
**Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Januari 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000316984

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
u.b.  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.  
NIP.197112182002121001

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.